



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya kondisi sosial ekonomi masyarakat maka perlu menyesuaikan dasar perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemungutan Air Tanah Kabupaten Tulungagung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kembali Pedoman Pemungutan Air Tanah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Seri B Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Seri E Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Seri D Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Non Niaga adalah setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan yang menggunakan air dengan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, antara lain : dipergunakan untuk kesehatan, pendidikan, perkebunan, agrobisnis, industri rumah tangga, perwakilan asing/internasional, asrama/pemondokan, rumah tangga mewah, perkantoran, dan penggunaan air lainnya yang sejenis.
12. Niaga adalah setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha yang menggunakan air semata-mata bertujuan untuk kegiatan yang menggunakan air semata-mata untuk memperoleh keuntungan, antara lain : bidang industri, perdagangan, jasa, perhotelan dan kolam renang, perusahaan perumahan (real estate).

13. Industri dengan Bahan Baku Air adalah setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha yang menggunakan air, sebagai bahan baku, yang produksi akhir berbentuk minuman.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perbitungan besarnya jumlah Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Tanah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil dan Surat Tagihan Pajak Daerah.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap permohonan atau pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakannya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, rumah ibadah, badan sosial, pengairan pertanian, perikanan rakyat, dan kantor Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah yaitu :

- a. Untuk orang pribadi, ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
- b. Untuk badan, ialah pengurus atau kuasanya.

BAB III
BENTUK, TATA CARA DAN PEMBERLAKUAN NPWPD

Pasal 5

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib mendaftarkan diri kepada Dinas untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Apabila Orang Pribadi atau Badan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengukuhkan Orang Pribadi atau Badan tersebut sebagai Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Bentuk dan isian formulir pendaftaran ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran atau surat pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menerbitkan Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan bukti tanda terima.
- (3) Bentuk kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) NPWPD mulai berlaku sejak diterbitkan.

BAB IV
METER AIR ATAU ALAT PENGUKUR DEBIT AIR

Pasal 7

- (1) Jumlah debit air merupakan dasar penetapan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (2) Pengukuran jumlah debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemasangan meter air.
- (3) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah disegel oleh pejabat yang berwenang dan ditera oleh Pejabat Metrologi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang belum memasang meter air maka pengukuran air dilakukan dengan memperhatikan kekuatan debit air dan penggunaan air dalam sehari atau sebulan.

BAB V
PENDATAAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH
Pasal 8

- (1) Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan setiap bulan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Dinas dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketidakhadiran sebagian petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pendataan.

BAB VI
PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN DAN/ATAU
PEMANFAATAN AIR TANAH
Pasal 9

- (1) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan oleh Dinas berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETETAPAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah adalah hasil perkalian dari volume air dengan harga dasar air.
- (3) Besarnya Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pribadi atau badan wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan data, volume air yang diambil, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Dinas Pendapatan dengan mengisi SPTPD.

- (4) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disampaikan kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 13

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala Dinas menetapkan Pajak Air Tanah dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH

Pasal 15

- (1) Sistem dan prosedur administrasi Pajak Air Tanah tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah.
- (2) Sistem dan prosedur administrasi Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara:
 - a. Pembayaran dan penagihan;
 - b. Pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Keringanan, pengurangan dan pembebasan;
 - d. Keberatan;
 - e. Penghapusan piutang pajak; dan
 - f. Pengembalian kelebihan pembayaran;

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Dinas.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas dengan cara mendatangi tempat tinggal Wajib Pajak atau pada tempat-tempat lain dan dapat didampingi oleh PPNS atau bersama-sama penyidik POLRI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 4 September 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 4 September 2015
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 33

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 33 TAHUN 2015
 TANGGAL : 4 September 2015


**NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**

| NO | PERUNTUKAN | VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp. / M ³) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|--|--|
| | | s/d 50 M ³ MATA AIR (Rp) | NON MATA AIR (Rp) | 51 s/d 500 M ³ MATA AIR (Rp) | NON MATA AIR (Rp) | 501 s/d 1.000 M ³ MATA AIR (Rp) | NON MATA AIR (Rp) | 1.001 s/d 2.500 M ³ MATA AIR (Rp) | NON MATA AIR (Rp) | 2.501 s/d 5.000 M ³ MATA AIR (Rp) | NON MATA AIR (Rp) | 5.001 s/d 7.500 M ³ MATA AIR (Rp) | NON MATA AIR (Rp) | DIATAS 7.500 M ³ MATA AIR (Rp) | NON MATA AIR (Rp) | | |
| 1 | NON NIAGA | 234 | 261 | 270 | 297 | 306 | 333 | 342 | 369 | 378 | 405 | 414 | 441 | 450 | 477 | | |
| 2 | NIAGA | 414 | 441 | 486 | 513 | 558 | 585 | 630 | 657 | 702 | 729 | 774 | 801 | 846 | 873 | | |
| 3 | INDUSTRI DENGAN BAHAN BAKU AIR | 1,854 | 1,881 | 2,574 | 2,601 | 3,294 | 3,321 | 4,014 | 4,041 | 4,734 | 4,761 | 5,454 | 5,481 | 6,174 | 6,201 | | |
| 4 | PDAM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | |

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) UNTUK PAJAK AIR TANAH

| | |
|---|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PENDAPATAN Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. 0355 - 320098 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217</p> | No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : |
| <p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK AIR TANAH</p> | |
| N.P.W.P.D <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> | Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung di TULUNGAGUNG |
| <p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. Beri nomor pada kotak <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung paling lambat pada tanggal (Official Assesment) Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment. | |
| <p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p> | |
| 1. Jenis sumber air | <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 01 Mata Air 02 Bukan Mata Air |
| 2. Lokasi sumber air | : |
| 3. Peruntukan | <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 01 Non Niaga 02 Niaga 03 Industri dg Bahan Baku Air 04 PDAM |
| 4. Volume air yang diambil (Lampiran rincian jumlah pengambilan dari tiap-tiap lokasi sumber air) | : m ³ |
| 5. Penunjukan Meter Air | a. Bulan ini : M ³ b. Bulan Lalu : M ³ c. Volume Air : M ³ |
| 6. Bukan Meter Air | a. Debit Air : Lt/detik b. Penggunaan 1 hari : Jam c. Penggunaan 1 bulan : Hari X x 3.600 x M ³ <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 1.000 = M ³ |

| B. PERNYATAAN | |
|--|--|
| Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sangsi - sangsi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. | |
| Tulungagung, 20..... Wajib Pajak | |
| <hr style="width: 10%; margin: auto;"/> Nama Jelas | |
| D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA | |
| Tata cara penghitungan dan penetapan pajak : | |
| <input type="checkbox"/> | 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda) |
| <input type="checkbox"/> | 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri) |
| Diterima tanggal | : |
| Nama Petugas | : |
| NIP | : |
| (_____) | |

MODEL DPD - 02H

..... ✂


| | |
|---|---------|
| No. SPTPD : | |
| <u>TANDA TERIMA</u> | |
| NPWPD | : |
| Nama | : |
| Alamat | : |
| Tulungagung, 20..... Yang Menerima | |
| (.....) | |

MODEL DPD - 02H

BUPATI TULUNGAGUNG

SYAHRI MULYO

CONTOH BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

|  | PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PENDAPATAN Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. 0355-320098 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 | SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) NO KOHIR Masa Pajak Tahun | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| NAMA WAJIB PAJAK : _____ | | | | | | | | | |
| ALAMAT WAJIB PAJAK : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| TANGGAL JATUH TEMPO : _____ | | | | | | | | | |
| NO | REKENING | JENIS PAJAK DAERAH | Jumlah Rp. | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Volume/Areal/Daya</th> <th style="width: 33%;">Harga Dasar</th> <th style="width: 33%;">Tarif</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | Volume/Areal/Daya | Harga Dasar | Tarif | | | | |
| Volume/Areal/Daya | Harga Dasar | Tarif | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak | | | | | | | |
| | | Jumlah Sanksi : a. Bunga | | | | | | | |
| | | b. Kenaikan | | | | | | | |
| | | Jumlah Keseluruhan | | | | | | | |
| Dengan huruf <input style="width: 80%; border: 1px solid black;" type="text"/> | | | | | | | | | |
| PERHATIAN | | | | | | | | | |
| 1. Penyetoran bisa dilakukan pada Bendahara Penerimaan (BP) Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung atau melalui Kasda/Bank Jatim (No Rekening 0151010100) | | | | | | | | | |
| 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat yang berwenang | | | | | | | | | |
| 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku | | | | | | | | | |
| Penyetor _____ NIP | Diterima oleh Bendahara Penerima _____ NIP | Tulungagung, 20..... a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan _____ NIP. | | | | | | | |



No. SKPD

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Tulungagung, 20.....


Yang Menerima

(.....)

BUPATI TULUNGAGUNG

SYAHRI MULYO

CONTOH BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPDKB)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|--|---|-----|---------------------------|-----|--------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--------------------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PENDAPATAN Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. 0355 - 320098 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217</p> | <p>SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p> | <p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>Tgl jatuh tempo :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>I. Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rek : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya :</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat kreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan Pembayaran pokok pajak (2 - 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Psl 96 (2))</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Psl 96 (5))</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 1. Dasar pengenaan | Rp. | 2. Pajak yang terutang | Rp. | 3. Kredit Pajak : | | a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : | Rp. | b. Setoran yang dilakukan | Rp. | c. Lain-lain | Rp. _____ | d. Jumlah yang dapat kreditkan (a + b + c) | Rp. _____ | 4. Jumlah kekurangan Pembayaran pokok pajak (2 - 3d) | Rp. _____ | 5. Sanksi administrasi : | | a. Bunga (Psl 96 (2)) | Rp. | b. Kenaikan (Psl 96 (5)) | Rp. _____ | c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) | Rp. _____ | 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) | Rp. _____ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Dasar pengenaan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kredit Pajak : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Lain-lain | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Jumlah yang dapat kreditkan (a + b + c) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Jumlah kekurangan Pembayaran pokok pajak (2 - 3d) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Sanksi administrasi : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Bunga (Psl 96 (2)) | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Kenaikan (Psl 96 (5)) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dengan huruf </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (BP) Dinas Pendapatan atau Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tulungagung, 20.....</p> <p>a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Tulungagung, 20.....

Yang Menerima


(.....)

MODEL DPD - 10D

BUPATI TULUNGAGUNG

SYAHRI MULYO

CONTOH BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPDKBT)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|--|---|-----|---------------------------|-----|--------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--------------------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PENDAPATAN Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. 0355 - 320098 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217</p> | <p>SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TABAHAN)</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p> | <p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>Tgl jatuh tempo :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>I. Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rek : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya :</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat kreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan Pembayaran pokok pajak (2 - 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Psl 96 (2))</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Psl 96 (3))</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table> | | | | | | | | 1. Dasar pengenaan | Rp. | 2. Pajak yang terutang | Rp. | 3. Kredit Pajak : | | a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : | Rp. | b. Setoran yang dilakukan | Rp. | c. Lain-lain | Rp. _____ | d. Jumlah yang dapat kreditkan (a + b + c) | Rp. _____ | 4. Jumlah kekurangan Pembayaran pokok pajak (2 - 3d) | Rp. _____ | 5. Sanksi administrasi : | | a. Bunga (Psl 96 (2)) | Rp. | b. Kenaikan (Psl 96 (3)) | Rp. _____ | c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) | Rp. _____ | 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) | Rp. _____ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Dasar pengenaan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kredit Pajak : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Lain-lain | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Jumlah yang dapat kreditkan (a + b + c) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Jumlah kekurangan Pembayaran pokok pajak (2 - 3d) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Sanksi administrasi : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Bunga (Psl 96 (2)) | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Kenaikan (Psl 96 (3)) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dengan huruf </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (BP) Dinas Pendapatan atau Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).</p> <p>2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tulungagung, 20.....</p> <p>a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan</p> <p>_____</p> <p>NIP. _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Tulungagung, 20.....

Yang Menerima


(.....)

MODEL DPD - 10E

BUPATI TULUNGAGUNG

SYAHRI MULYO

CONTOH BLANGKO SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STPD)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PENDAPATAN Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. 0355-320098 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217</p> | <p>STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p> Masa Pajak : Tahun : | No. Urut <table border="1" style="margin: auto; width: 80px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama : Alamat : NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Tgl. Jatuh Tempo : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Berdasarkan Pasal 98 Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rek : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Nama Pajak : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. _____ 2. Sanksi administrasi : a. Bunga (Psl) Rp. _____ 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dengan Huruf <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 600px; height: 20px;"></table> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PERHATIAN</p> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BP atau Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan | | | | | | | | | | | | | | |
| Tulungagung, 20..... a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan _____ NIP. _____ | | | | | | | | | | | | | | |

MODEL DPD-11A

| | |
|--|--|
| <p>TANDA TERIMA</p> NPWPD : Nama : Alamat : | No. SKPDLB Tulungagung, 20..... Yang Menerima (.....) |
|--|--|

MODEL DPD - 11A

BUPATI TULUNGAGUNG

SYAHRI MULYO